



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESIRIR
SELATAN**

TAHUN 2016 – 2021

Rencana Strategis RENSTRA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



2016 - 2021

DAFTAR ISI

Daftar isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.3	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	5
2.1	Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2	Sumberdaya Sekretariat Daerah	9
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	12
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	17
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	19
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	21
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII	PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015	13
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan	15
Tabel 3.1	Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021	26
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	07
Gambar 2	Struktur Organisasi Asisten I	08
Gambar 3	Struktur Organisasi Asisten II	08
Gambar 4	Struktur Organisasi Asisten III	09

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021. Dalam rangka mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2016-2021. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Painan, 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
PESIR SELATAN

RIZON, MT)
NIP. 19630323 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses-proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat

Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah
- 2.3. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Faktor-Faktor Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH****2.1. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

2.1.1. Tujuan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Mengacu pada struktur organisasi, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh Bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi tiga (3) Asisten yaitu :

- a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** yang membawahi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi dukcapil, Keagamaan, Kecamatan dan penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan** yang membawahi Bagian Pembangunan dan Infrastruktur, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan serta pengkoordinasi Perangkat Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum** yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Humas dan Protokoler, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang administrasi umum kesekretariatan yang meliputi bidang organisasi perangkat daerah, umum, hukum, humas dan aset serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

2.1.3. Struktur Organisasi

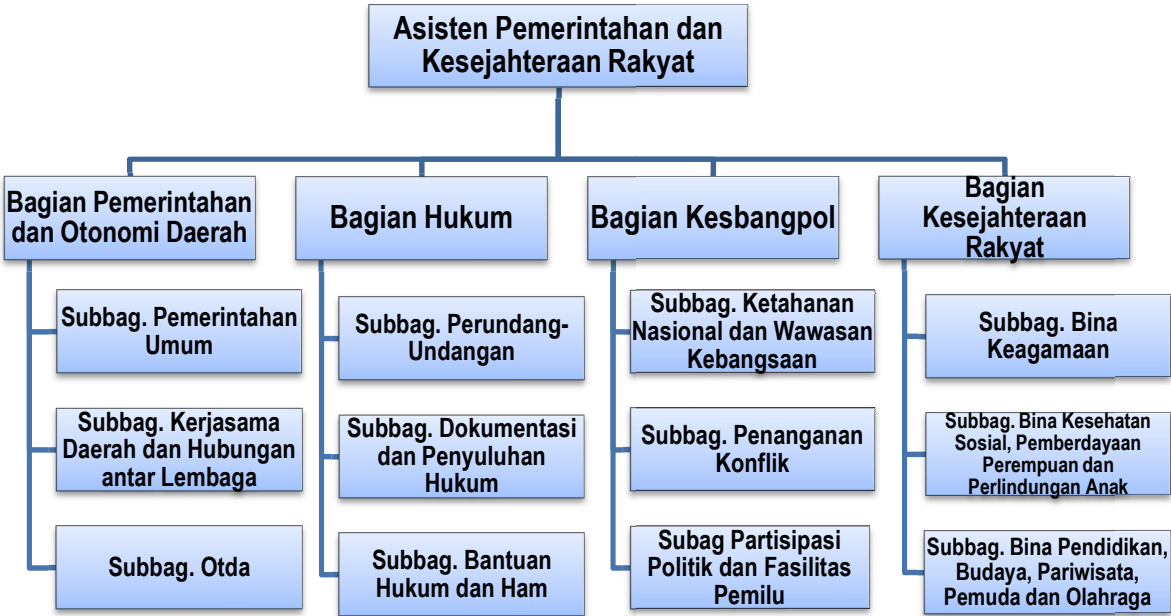
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu tiga Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing masing asisten membawahi bagian-bagian sebagaimana tergambar dalam gambar-gambar bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang dibagi menurut Asisten Masing-masing. Bagian-bagian yang berada di Sekretariat :

- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- f. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
- g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Bagian Umum
- i. Bagian Humas dan Protokoler
- j. Bagian Keuangan
- k. Bagian Organisasi

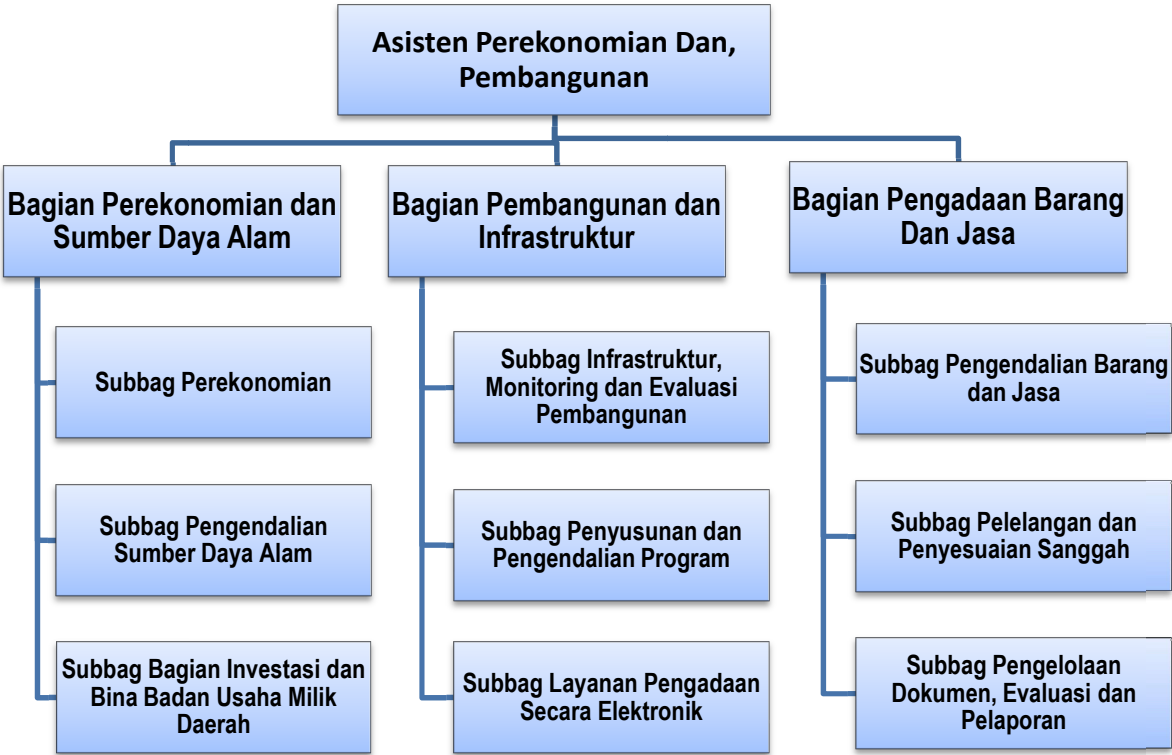
Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Gambar 2
Struktur Organisasi Asisten I



Gambar 3
Struktur Organisasi Asisten II



Gambar 4
Struktur Organisasi Asisten III



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dan pelaksana pengendalian pembangunan.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal 2017 sebanyak 127 (Seratus dua puluh tujuh) orang, dengan rincian dapat dilihat dari berbagai pendekatan sebagaimana tergambar dalam table-tabel berikut antara lain :

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN GOLONGAN

No	UNIT KERJA	JML					
		Non PNS	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	-	-	6	6
2.	Staf Bagian Staf Ahli	-	-	-	-	3	3
3.	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	-	-	5	1	6
4.	Bag. Hukum	1	-	-	9	-	9
5.	Bag. Kesbang Pol	1	1	1	8	-	10
6.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	2	3	1	6
7.	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur	1	-	1	4	2	7
8.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	-	1	8	1	10

9.	Bag. Kesra	2	-	3	5	-	8
10.	Bag. Umum	10	-	16	12	-	28
11.	Bag. Organisasi	-	-	3	4	-	7
12.	Bagian Keuangan	-	-	5	9	-	14
13.	Bagian Humas	1	-	6	7	-	13
JUMLAH		19	1	38	74	14	127

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	SI	S II	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	-	-	-	6	6
2.	Staf Bagian Staf Ahli	-	-	-	-	2	1	3
3.	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	3	3	6
4.	Bag. Hukum	-	-	-	-	9	-	9
5.	Bag. Kesbang Pol	-	1	1	-	5	3	10
6.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	1	3	1	6
7.	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur	-	-	-	1	4	2	7
8.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	1	-	7	2	10
9.	Bag. Kesra	-	-	2	1	3	2	8
10.	Bag. Umum	-	-	15	3	8	2	28
11.	Bag. Organisasi	-	-	3	-	2	2	7
12.	Bagian Keuangan	-	-	4	3	4	3	14
13.	Bagian Humas	-	-	6	1	4	2	13
JUMLAH		-	1	33	10	54	29	127

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Pada tahun 2017 untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

TABEL 2.3
SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	31
2.	Sepeda Motor	44
3.	Mesin Ketik	22
4.	Mesin Hitung Uang	1
5.	Mesin Foto Copy	2
6.	Lemari Besi	16
7.	Filling Besi	43
8.	Lemari Penyimpanan	1
9.	Peti Uang	4
10.	Lemari Kaca	8
11.	Lemari Makan	9
12.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	45
13.	Mesin Penghancur Kertas	17
14.	Meja Biro	43
15.	Kursi Biro	44
16.	Generator Set	7

17.	Stabilizer	18
18.	Proyektor / Infocus	5
19.	Tempat tidur kayu lengkap	23
20.	Meja Rapat	20
21.	Meja Makan	6
22.	Meja Kerja Staf	15
23.	Kursi Rapat	234
24.	Kursi Tamu	40
25.	Kursi Tangan	4
26.	Kursi Putar	71
27.	Kursi Biasa	246
28.	Kursi Lipat	18
29.	Meja Komputer	20
30.	Meja ½ Biro	120
31.	Kursi Kerja Staf	201
32.	AC Sentral	18
33.	AC Unit	29
34.	AC Split	67
35.	Kipas Angin	66
36.	Televisi	33
37.	Wireless	9
38.	Home Theater	1
39.	Camera Video	24
40.	Lambang Garuda Pancasila	5
41.	Gorden	10
42.	Lemari Es	4
43.	Komputer	61
44.	Laptop	25
45.	Notebook	23
46.	Ipad	20
47.	Printer	17
48.	Harddisk External	22
49.	Server	8
50.	Router	5
51.	Hub	1
52.	Kabel LAN	7
53.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
54.	Meja Rapat Pejabat Eselon I	1
55.	Meja tamu biasa	2
56.	Proyektor + Attachment	5
57.	Camera Digital	20
58.	Sound System	11
59.	Telephone (PABX)	30
60.	Faximile	3
61.	Telex	3
62.	Radio Orari	1
63.	Anthena Call	1
64.	Radio UHF	7
65.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
66.	Bagunan Gudang Tertutup Permanen	1
67.	Bagunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1
68.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	5
69.	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3
70.	Gedung Pos Jaga Permanen	2
71.	Rumah Dinas Golongan I	3

72.	Handycam	4
73.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	3
74.	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	1
75.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6
76.	Tanah Bangunan Taman	1
77.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1
78.	Tanah Jaringan/Saluran	1
79.	Tanah Jalan	4
80.	Tanah untuk Bangunan Mesjid	1

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2011-2015 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

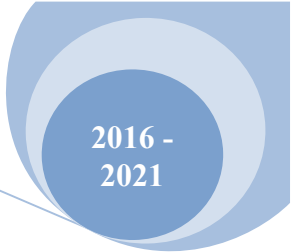
TABEL 2.4
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PESISIR SELATAN
TAHUN 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Perda dan Perbup SOTK								26 Perda/Perbup					26 Perda/Perbup					100%
2	Rapor SKPD dan Rapor IKM					27 Buku	27 Buku	27 Buku	27 Buku		27 Buku	27 Buku	27 Buku	27 Buku					100%
3	Buku LAKIP								30 Buku					30 Buku					100%
4	Laporan Keuangan dan Aset Daerah				350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	348 dokumen	100%	100%	100%	100%	99%
5	Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan				60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	65 dokumen	100%	100%	100%	100%	108%
6	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana operasional KDH				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kerjasama Promosi Daerah dengan Media Massa				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Paket Pengadaan yang dilelang				40 paket	70 paket	100 paket	130 paket	160 paket	50 paket	262 paket	143 paket	157 paket	227 paket	125%	374%	110%	120%	141%
12	Buku Sisdur APBD dan Buku HSPK				2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100%	100%	100%	100%	100%
13	Buku laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya monitoring Raskin, BBM dan Pupuk Bersubsidi				15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB. PESSEL

2016 -
2021

15	Diikutinya Pameran AITIS 2015				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pemantauan Inflasi dan BPSK				15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terlaksananya Pembinaan Keagamaan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
18	Diikutinya MTQ Tingkat Propinsi Tahun 2015				1 kali		1 kali		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali	100%		100%		100%
19	Sengketa Hukum yang Diselesaikan				6 kasus	7 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	6 kasus	7 kasus	4 kasus	4 kasus	6 kasus	100%	100%	100%	100%	150%
20	Perda dan Perbup				250 Perda/Perbub	50 Perda/Perbub	60 Perda/Perbub	40 Perda/Perbub	70 Perda/Perbub	289 Perda/Perbub	54 Perda/Perbub	57 Perda/Perbub	37 Perda/Perbub	74 Perda/perbub	114%	108%	95%	92%	106%
21	Terlaksananya Bintek Legal Drafting				25 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	25 SKPD	25 SKPD	10 SKPD	37 SKPD	15 SKPD	25 SKPD	100%	66%	247%	100%	100%
22	Buku Lembaran Daerah				1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terpeliharannya ketertiban Masyarakat				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
24	Terlaksananya Upacara hari besar				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
25	Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah.								1 kali					1 kali					100%
26	Terbebaskannya Tanah untuk Pembangunan				80.000 M2	230.000 M2	80.000 M2	80.000 M2	80.000 M2	80.000 M2	227,578 M2	227,587 M2	80.000 M2	73.111 M2	100%	99%	284%	100%	91%
27	Perda dan Perbup Pemerintahan Nagari								2 Perda/Perbub					2 Perda/Perbub					100%
28	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan				15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
29	Buku LPPD dan LPPD AMJ				1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	2 buku	1 buku	1 buku	1 buku	2 buku	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN RELISASI PENDANAAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011-2015

	URAIAN/PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIK			1.426.528.200	1.388.250.300	1.378.971.000			1.422.180.635	1.384.196.600	1.375.360.300			99,70	99,71	99,74
2	MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			65.000.000	32.562.100	38.965.250			54.005.300	30.358.900	28.530.100			83,09	93,23	73,22
3	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI					50.000.000					36.385.450					72,77
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			164.203.050	310.863.500	329.013.400			158.924.650	302.900.700	310.210.045			96,79	97,44	94,28
5	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	3.139.190.950	6.665.195.455	4.468.045.110	10.000.506.400	6.745.323.804	2.980.268.178	2.189.341.630	3.026.190.128	4.393.895.483	5.934.336.108	94,94	32,85	67,73	43,94	87,98
6	PENYELESAIAN KONFLIK KONFLIK PERTANAHAN			495.451.600	194.844.600	101.478.200			318.462.100	125.824.000	66.092.048			64,28	64,58	65,13
7	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			526.258.750	645.895.750	798.294.100			517.931.500	634.106.840	788.134.700			98,42	98,17	98,73
8	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	19.210.000	37.099.850	34.762.600	23.303.600	35.356.400	18.935.000	36.992.850	18.504.400	22.931.100	31.834.650	98,57	99,71	53,23	98,40	90,04
9	PENINGKATAN KEAMANAN DAN PENYAMANAN LINGKUNGAN			25.794.900	27.938.000	72.225.700			25.514.040	20.977.400	51.309.800			98,91	75,09	71,04
10	PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	310.380.700	457.340.000	417.408.100	501.845.400	447.542.700	310.414.700	456.840.000	398.637.700	429.635.205	386.670.195	100,01	99,89	95,50	85,61	86,40
11	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			68.167.000	230.959.200	306.770.700			64.981.000	193.282.100	211.929.700			95,33	83,69	69,08
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			203.900.000	219.153.600	187.627.700			203.388.000	209.795.400	157.790.600			99,75	95,73	84,10
13	PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)				291.000.000	281.885.600				290.893.600	244.398.400				99,96	86,70
14	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		56.900.000	426.149.500	423.241.500	279.389.350		56.900.000	421.474.200	375.563.300	216.861.492		100,00	98,90	88,73	77,62
15	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.345.022.736	9.083.312.080	6.000.167.930	6.902.854.468	4.395.215.148	8.280.433.642	8.755.697.735	5.989.563.747	6.246.977.125	3.808.679.993	99,23	96,39	99,82	90,50	86,66

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB. PESSEL

2016 -
2021

16	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.668.655.000	6.395.571.970	4.112.091.500	3.400.522.500	4.436.918.600	2.595.257.796	5.761.863.170	4.029.463.441	3.142.035.429	4.299.620.027	97,25	90,09	97,99	92,40	96,91
17	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	67.800.000					66.726.746					98,42				
18	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			312.613.510	359.856.055	229.522.600			309.159.125	359.711.045	228.527.850			98,89	99,96	99,57
19	PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	100.000.000	275.000.000	343.300.000	368.750.000	367.640.800	99.418.000	274.915.930	342.807.910	368.028.300	118.417.079	99,42	99,97	99,86	99,80	32,21
20	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	127.069.252	239.328.980	395.427.395	667.178.412	442.389.269	126.909.252	237.433.510	363.447.415	613.202.687	325.964.175	99,87	99,21	91,91	91,91	73,68
21	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	248.004.361	200.046.355	453.213.425	397.915.270	676.140.655	238.091.081	187.622.455	443.252.552	375.811.164	528.280.304	96,00	93,79	97,80	94,45	78,13
22	PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	499.437.992	542.944.520	581.343.935	481.030.395	428.716.263	469.779.772	537.607.084	537.190.649	457.185.199	371.398.717	94,06	99,02	92,40	95,04	86,63
23	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	168.719.250	367.909.050	717.081.870	590.651.502	570.154.758	167.924.200	339.712.450	531.074.824	552.361.907	428.751.108	99,53	92,34	74,06	93,52	75,20
24	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	149.658.400	232.700.040				146.980.000	231.799.800				98,21	99,61			
25	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMDA		263.020.395	524.305.685	667.836.515	894.203.975		175.171.935	442.494.652	638.666.216	843.573.256		66,60	84,40	95,63	94,34
26	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATAUSAHAAN PEMDA	128.319.654	22.771.780	441.003.200			128.273.049	22.583.950	274.458.375			99,96	99,18	62,24		
27	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		74.999.917	198.400.560	460.484.609	148.295.834		47.711.150	183.414.455	425.803.510	137.429.652		63,61	92,45	92,47	92,67
28	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR			58.875.130	317.357.543	325.145.814			54.055.545	297.619.974	321.008.518			91,81	93,78	98,73
29	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	149.999.800	238.342.045	205.047.775	227.600.525	292.014.600	149.521.800	232.511.285	200.681.474	224.377.676	267.387.854	99,68	97,55	97,87	98,58	91,57
30	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	595.888.550	782.486.520	1.724.799.650	1.410.184.040	1.965.728.310	591.712.750	762.785.710	1.565.865.227	1.243.156.427	1.613.994.169	99,30	97,48	90,79	88,16	82,11
31	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (KDH)			2.731.441.950	2.914.055.050	2.920.248.500			2.516.684.337	2.680.637.066	2.306.374.550			92,14	91,99	78,98
32	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (KDH)			1.643.540.713	1.463.775.000	1.927.139.700			1.502.017.375	1.257.331.069	1.253.381.365			91,39	85,90	65,04

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB. PESSEL

2016 -
2021

33	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (KDH)	483.625.000	606.078.880	159.975.000	180.725.000	159.975.000	482.486.450	605.162.830	159.889.975	179.776.512	159.840.882	99,76	99,85	99,95	99,48	99,92
34	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (KDH)		100.000.000	174.800.000	249.800.000			98.048.207	170.026.429	249.258.504			98,05	97,27	99,78	
35	ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH	107.672.775	202.294.175	329.903.430	305.420.430	453.039.000	105.722.775	187.099.575	185.236.328	242.145.130	259.463.500	98,19	92,49	56,15	79,28	57,27
36	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGGAAN		24.965.000	50.338.000				21.006.500	36.641.412				84,14	72,79		
37	PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH	370.000.000	1.083.039.925	1.133.374.730	696.052.404	495.547.101	346.332.090	1.047.551.605	855.391.285	581.859.780	402.102.207	93,60	96,72	75,47	83,59	81,14
38	PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN				95.477.800	124.325.200				75.061.650	106.994.750				78,62	86,06
39	PENINGKATAN IMTAQ BAGI PEGAWAI	60.000.000	71.000.000			237.046.280	59.949.700	70.498.700			193.014.910	99,92	99,29			81,42
40	PENINGKATAN PONDOK ALQURAN	57.431.000	1.393.411.100				56.700.000	1.393.411.100				98,73	100,00			
41	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				43.000.000	133.051.314				20.007.200	73.504.345				46,53	55,25
42	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA/NAGARI					455.545.000					426.705.029					93,67
43	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH NAGARI					177.537.200					92.214.700					51,94
44	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMERINTAH NAGARI					110.990.800					46.661.500					42,04
45	PENYELENGGARAAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH				354.399.000	387.632.000				327.589.500	374.304.000				92,44	96,56
46	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA			130.055.000	41.990.000	159.579.600			128.657.500	41.329.000	74.141.400			98,93	98,43	46,46
47	KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	973.475.000	1.212.039.000	1.301.062.500	1.331.012.500	2.377.644.700	972.030.780	1.210.373.027	1.300.491.100	1.308.741.610	2.274.209.850	99,85	99,86	99,96	98,33	95,65
48	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	52.769.600	33.260.000				52.560.100	32.856.300				99,60	98,79			
49	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN					28.507.000					23.689.566					83,10
50	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIKAN			371.000.000	831.390.000				368.814.000	469.632.235				99,41	56,49	
		18.822.330.020	30.661.057.037	32.414.831.698	39.049.682.968	36.372.738.925	18.446.427.861	24.973.498.488	29.120.972.785	30.792.666.543	31.199.478.844	98,00	81,45	89,84	78,86	85,78

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015, Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 sampai dengan 2021 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan.
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa pengendalian program, dan mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama.

Untuk menjawab tantangan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program/Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Dalam hal kebijakan pada Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebesar 54,41 katagori CC = Cukup Baik.
2. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
3. Peraturan yang ada belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
4. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
5. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten.
6. Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
7. Masih rendahnya Budaya Kerja;
8. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan;
9. Belum optimalnya pengawasan, legislasi dan perencanaan penganggaran yang efisien;
10. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku;
11. Belum optimalnya pembinaah kewilayahan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan sampai ketingkat nagari.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Perangkat Daerah.
2. Terdapatnya Kegiatan yang tumpang tindih (*overlapping*).
3. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa masih rendah.
4. Masih lemahnya perencanaan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
2. Belum optimalnya penataan kelembagaan sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
2. Sering terlambatnya petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL,
AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2011-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Rumusan Misi Sekretariat Daerah Daerah adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Indikator tujuan : Nilai survey pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Sasaran :

- Meningkatnya nilai pelayanan publik OPD pelayanan.
- Meningkatnya layanan pembentukan produk hukum.
- Meningkatnya Layanan Publikasi
- Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Tujuan : Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator tujuan : Persentase peningkatan kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

2. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Tujuan : Meningkatnya Pembinaan Keagamaan.

Indikator tujuan : Persentase pembinaan keagamaan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan keagamaan.

Sasaran :

- Meningkatnya pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
- Meningkatnya Pembinaan Taman Pendidikan AlQuran (TPQ) Aktif

3. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Tujuan : Meningkatnya peran serta aparat pemerintah dalam bidang perlindungan masyarakat.

Indikator tujuan : Persentase Konflik yang Tertangani.

Sasaran :

- Meningkatnya peran struktur sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat pada forum komunikasi publik dan partai politik.

Berdasarkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan untuk memenuhi harapan dari misi di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan sinkronisasi isu-isu strategis yang terjadi di ditingkat nasional dan dan propinsi untuk dijadikan bahan acuan. Sinkronisasi isu-isu strategis tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
SINKRONISASI ISU STRATEGIS NASIONAL, PROPINSI SUMATERA
BARAT DAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan public
2.	Peningkatan Pendidikan Keagamaan	Pengembangan Mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai Adat dan Agama	Meningkatkan pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Perangkat Daerah yang fungsi utamanya adalah fungsi koordinasi maka pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat daerah secara teknis tidak berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup. Mengingat isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisa data dan infromasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan isu-isu strategis sebagai permasalahan utama yang sedang dan akan dihadapi lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil review Renstra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 serta permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai visi-misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Kelembagaan yang belum optimal, efektif dan efisien.
2. Perlunya penyempurnaan SPM dan SOP.
3. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku.
4. Kompetensi SDM masih rendah.
5. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana beroritasi pada Teknologi Informasi.

6. Belum optimalnya penerapan *Reward* dan *Punishment* memotivasi aparatur dalam meningkatkan kinerjanya.
7. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
8. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
9. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah.

Implikasi isu-isu strategis tersebut terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

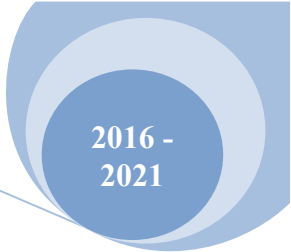
1. Penerapan kaidah *good governance* dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan sampai ketingkat nagari.
3. Penerapan kebijakan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap permasalahan daerah.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.

5. Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan tugas administrasi dan umum.
8. Peningkatan kinerja pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
9. Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas aparatur dengan pembinaan teknis dan administrasi bagi aparatur.
10. Peningkatan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD.
11. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.
12. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal.
13. Peningkatan koordinasi internal Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja yang saling bersinergi.
14. Peningkatan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui unjuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Survey Pelayanan Publik Pemerintah Daerah						95/sangat baik
		Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik OPD Pelayanan	Persentase Rata-rata Pelayanan Publik OPD yang bernilai baik (Nilai)	76/ Baik	78/ Baik	80/ Baik	88/ Baik	90/ Sangat baik	95/ Sangat baik
		Meningkatnya Layanan Pembentukan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Layanan Publikasi	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan (%)	80	80	80	90	90	100
		Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik (%)	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (%)						100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD	3037	3130	3180	3230	3300	3350
3	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan		Persentase Pembinaan Keagamaan yang Dilakukan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Keagamaan (%)						90
		Meningkatnya Pembinaan Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	7 besar	6 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar
		Meningkatnya Pembinaan Taman Pendidikan Alquran (TPQ)	Persentase TPQ Aktif	80	80	90	90	95	95
4	Meningkatnya Peran Serta Aparat Pemerintah Dalam Bidang Perlindungan Masyarakat		Persentase Konflik Yang Tertangani (%)						80
		Meningkatnya Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dan Obat –Obat Terlarang	Jumlah Struktur Sosial yang Aktif dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika	0	0	31	36	41	46
		Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat pada Forum Komunikasi, Pengetahuan Publik dan Partai Politik	Persentase Ormas Yang Terdaftar Aktif Sesuai Ketentuan Perundang-undangan. (%)	80	80	90	95	95	100

Tabel di atas merupakan rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Eselon II. Sedangkan untuk Sasaran dan Indikator Eselon III dan IV dapat dilihat pada lampiran. Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sedang **merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Melaksanakan reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik OPD Pelayanan	Melakukan restrukturisasi kelembagaan, kewenangan , SOP, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
		Melakukan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Menilai, menyusun laporan penilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya layanan pembentukan produk hukum	Menyediakan pedoman dan aturan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintahan dengan melahirkan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku	Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah
	Meningkatnya Layanan Publikasi	Penerapan teknologi informasi untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah	Melakukan publikasi kegiatan Pemerintahan secara tepat dan actual
	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Secara Elektronik	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi	Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan terendah dengan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan	Menyediakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, dan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan
	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Melakukan pembinaan dan penetapan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
MISI 3 : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK			
Meningkatnya Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Pembinaan Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan	Melaksanakan Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan
	Meningkatnya Anak Usia Sekolah yang Pandai Baca Al'Quran dan Sholat	Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi guru mengaji di kabupaten pesisir selatan	Melaksanakan pelatihan, monitoring dan evaluasi tenaga pendidik bidang keagamaan di kabupaten pesisir selatan
MISI 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang			
Meningkatnya Peran Serta Aparat Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat terlarang	Meningkatkan wawasan masyarakat tentang bahaya narkoba, kerjasama dengan pihak terkait dan tindakan preventif dan represif terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang	Mengadakan sosialisasi, Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, melaksanakan tes urin terhadap seluruh aparatur pemerintah.
	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pada Forum Komunikasi, Pengetahuan Publik dan Partai Politik	Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan.	Melakukan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering, revitalisasi, restrukturisasi* birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

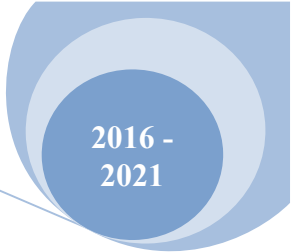
Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program

kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2016-2021.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2016–2021 terbagi pada 11 (Sebelas) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik		76/ Baik	78/ Baik	80/ Baik	88/ Baik	90/ Sangat baik	95/ Sangat baik	95/ Sangat baik
2	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan		80%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
4	Persentase layanan pengadaan secara elektronik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		C	B	BB	BB	BB	BB	BB
6	Nilai LPPD		3037	3130	3180	3230	3300	3350	3350
7	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi		7 besar	6 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar
8	Persentase TPQ Aktif		80%	80%	90%	90%	95%	95%	95%
9	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika		0	0	31 kelompok	36 kelompok	41 kelompok	46 kelompok	46 kelompok
10	Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan		80%	80%	90%	95%	95%	100%	100%

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	76/ Baik	78/ Baik	80/ Baik	88/ Baik	90/ Sangat baik	95/ Sangat baik	OPD Pelayanan yang disurvey	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya layanan pembentukan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum Yang di Fasilitasi}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang Masuk ke Bagian Hukum}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua OPD	Bagian Hukum
3	Meningkatnya layanan publikasi	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	80%	80%	80%	90%	90%	100%	Semua OPD	Bagian humas
4	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	$\frac{\text{Jumlah Paket yang Difasilitasi LPSE}}{\text{Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Masuk}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua OPD	Bagian Pembangunan
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	C	B	BB	BB	BB	BB	Semua OPD	Bagian Organisasi, Bappedalitbang, Inpektorat
6	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3037	3130	3180	3230	3300	3350	Semua OPD	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Meningkatnya pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Peingkat MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	7 besar	6 besar	5 besar	5 besar	5 besar	5 besar	Bagian Kesejahteraan rakyat	Bagian Kesejahteraan rakyat

8	Meningkatnya pembinaan Taman Pendidikan Alquran (TPQ)	Persentase TPQ Aktif	$\frac{\text{Jumlah TPQ yang dibina}}{\text{dibagi jumlah TPQ yang ada}} \times 100\%$	80%	80%	90%	90%	95%	95%	Bagian Kesejahteraan rakyat	Bagian Kesejahteraan rakyat
9	Meningkatnya jumlah struktur sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Struktur Sosial yang aktif	0	0	31 kelompok	36 kelompok	41 kelompok	46 kelompok	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Meningkatnya pengetahuan masyarakat pada forum komunikasi, pengetahuan publik, dan partai politik	Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah ormas yang terdaftar aktif}}{\text{Jumlah seluruh Ormas}} \times 100\%$	80%	80%	90%	95%	95%	100%	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Painan, 4 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN PESIR SELATAN
PESIR SELATAN
SETDA
(RIZON, MT)
30323 199003 1 005

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai Survey Pelayanan Publik Pemerintah Daerah												95/Sangat Baik		95/Sangat Baik		
	1. Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik OPD Pelayanan			Persentase Rata-rata Pelayanan Publik OPD yang bernilai baik (Nilai)		76/Baik		78/Baik		80/Baik		90/Sangat Baik		90/Sangat Baik		95/Sangat Baik		95/Sangat Baik		
			Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat	-			B	205.000.000	BB	390.000.000	BB	450.000.000	BB	610.000.000	A	620.000.000	A	620.000.000	
			1 Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelayanan publik						4 Laporan	85.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	125.000.000	4 Laporan	125.000.000	Bag. Organisasi
			2 Bimbingan Teknis Standar Pelayanan	Jumlah peserta Bimtek Standar Pelayanan				100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	Bag. Organisasi
			3 Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang difasilitasi						2 inovasi	175.000.000	2 inovasi	175.000.000	2 inovasi	230.000.000	2 inovasi	240.000.000	2 inovasi	240.000.000	Bag. Organisasi
			4 Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemdakab. Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen SOP								1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Bag. Organisasi
			5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD pelayanan publik yang disurvei	-			2 OPD	80.000.000	17 OPD	90.000.000	15 OPD	110.000.000	45 OPD	125.000.000	45 OPD	125.000.000	45 OPD	125.000.000	Bag. Organisasi
			6 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perbub Pelayanan Publik	-									1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	Bag. Organisasi
	2. Meningkatnya Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah			Persentase Produk Hukum Daerah yang Difasilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk hukum yang difasilitasi		85%	920.000.000	90%	1.035.000.000	90%	1.035.000.000	95%	1.090.000.000	95%	1.190.000.000	95%	1.190.000.000	95%	2.175.000.000	Bag. Hukum
				Persentase Produk Hukum yang di Publikasi		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
			1 Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi	-	30 dokumen	240.000.000	20 Dokumen	260.000.000	50 dokumen	280.000.000							50 dokumen	280.000.000	Bag. Hukum
			2 Pembentukan Peraturan Daerah	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	-	10 dokumen	250.000.000	8 dokumen	270.000.000	8 dokumen	290.000.000							8 dokumen	290.000.000	Bag. Hukum
			3 Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum	Jumlah Buku SJDI yang Disusun	-	500 buku	110.000.000	260 buku	130.000.000	260 buku	150.000.000							260 buku	150.000.000	Bag. Hukum
			4 Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati	Jumlah Keputusan Bupati yang divalidasi	-	550 dokumen	80.000.000	550 dokumen	100.000.000									550 dokumen	100.000.000	Bag. Hukum
			5 Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari	Jumlah Produk Hukum Nagari yang Dievaluasi	-	15 Dokumen	130.000.000	20 dokumen	150.000.000	23 dokumen	165.000.000							23 dokumen	165.000.000	Bag. Hukum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			6 Bimbingan Teknis Legal Drafting Produk Hukum Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Legal Drafting Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan	-	1 kali	110.000.000	1 kali	125.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	175.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	Bag. Hukum
			7 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi								50 dokumen	300.000.000	50 dokumen	320.000.000	50 dokumen	320.000.000	50 dokumen	320.000.000	Bag. Hukum
			8 Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang difasilitasi								8 dokumen	310.000.000	8 dokumen	330.000.000	8 dokumen	330.000.000	8 dokumen	330.000.000	Bag. Hukum
			9 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran daerah yang dipublikasi								270 buku	170.000.000	280 buku	190.000.000	280 buku	190.000.000	280 buku	190.000.000	Bag. Hukum
				Jumlah berita daerah yang dipublikasi								270 buku		280 buku		280 buku		280 buku		
			10 Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/ Klarifikasi Peraturan Nagari	Jumlah Keputusan Bupati yang divalidasi								550 dokumen	135.000.000	550 dokumen	150.000.000	550 dokumen	150.000.000	550 dokumen	150.000.000	Bag. Hukum
				Jumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi								10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		
			Advokasi Pemerintah Daerah	Persentase Sangketa hukum yang difasilitasi		70%	<u>325.000.000</u>	75%	<u>350.000.000</u>	85%	<u>375.000.000</u>	90%	<u>400.000.000</u>	90%	<u>450.000.000</u>	100%	<u>450.000.000</u>	100%	<u>450.000.000</u>	
			1 Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah perkara hukum yang diselesaikan		6 Perkara	325.000.000	6 Perkara	350.000.000	6 Perkara	375.000.000	10 kasus	400.000.000	15 kasus	450.000.000	15 kasus	450.000.000	15 kasus	450.000.000	Bag. Hukum
	3. Meningkatnya Layanan Publikasi			Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa		90%	<u>56.252.200</u>											90%	<u>56.252.200</u>	
			1 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)	Pesentase Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)	-	100%	56.252.200											100%	56.252.200	Bag. Humas dan Protokoler
			Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan Media Massa dalam penyebaran informasi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku	-	25 Media Massa	<u>1.650.000.000</u>	27 Media Massa	<u>1.700.000.000</u>	27 Media Massa	<u>1.780.000.000</u>	27 Media Massa	<u>1.940.000.000</u>	27 Media Massa	<u>2.000.000.000</u>	27 Media Massa	<u>2.000.000.000</u>	27 Media Massa	<u>2.000.000.000</u>	
			1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerja sama dengan Media Massa	-	25 Media Massa	600.000.000	27 Media Massa	700.000.000	27 Media Massa	700.000.000	27 Media Massa	700.000.000	27 Media Massa	700.000.000	27 Media Massa	700.000.000	27 Media Massa	700.000.000	Bag. Humas dan Protokoler
			2 Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemerintah daerah	-	2400 lembar Cetak Foto	250.000.000	2400 lembar Cetak Foto	200.000.000	2400 lembar Cetak Foto, 100 video, 60 spanduk	200.000.000	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	350.000.000	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	400.000.000	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	400.000.000	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	400.000.000	Bag. Humas dan Protokoler

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 Publikasi dan Promosi Daerah	Jumlah publikasi dan promosi daerah	-	40 kali	800.000.000	50 kali	800.000.000	50 kali	800.000.000	50 kali	800.000.000	60 kali	800.000.000	70 kali	800.000.000	70 kali	800.000.000	Bag. Humas dan Protokol
			4 Bimbingan Teknis Kapasitas Kewartawanan dan Pers/Studi Banding	Jumlah Peserta BinteK Kewartawanan dan Pers						30 orang	80.000.000	30 orang	90.000.000	35 orang	100.000.000	35 orang	100.000.000	35 orang	100.000.000	Bag. Humas dan Protokol
	4. Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik			Persentase Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		92%		92%	680.619.818	95%	1.110.000.000	95%	1.460.000.000	95%	1.670.000.000	95%	1.725.000.000	95%	2.099.400.964	
				Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE		20%		25%		30%		35%		40%		45%		45%		
			1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan		12 kali	65.000.000	12 kali	74.750.000	24 kali	75.000.000	24 kali	75.000.000	24 kali	75.000.000	24 kali	75.000.000	24 kali	75.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			2 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik		45 OPD	225.973.755	45 OPD	259.869.818	100%	260.000.000							100%	260.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			3 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang		230 paket	114.400.964											230 paket	114.400.964	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			4 Pelelangan dan Penyelesaian Sanggahan Pengadaan dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase sanggahan yang dapat diselesaikan				100%	146.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa
			5 Rapat Koordinasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						12 kali	50.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali	100.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa
			6 Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Jumlah Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa						1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa
			7 Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa				12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa
			8 Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa				15 orang	115.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	20 orang	200.000.000	25 orang	250.000.000	25 orang	250.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa
			9 Pengembangan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Barang dan Jasa						1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	260.000.000	Bag. Pengadaaan Barang dan Jasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			10 Fasilitas Lelang dan Klarifikasi PBJ	Jumlah Fasilitas dan Klarifikasi Lelang						150 paket	125.000.000	175 paket	300.000.000	200 paket	300.000.000	200 paket	300.000.000	200 paket	300.000.000	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
			11 Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik								45 OPD	275.000.000	45 OPD	280.000.000	45 OPD	280.000.000	45 OPD	280.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah				Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah														100%		
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		C		B		BB		BB		BB		A		A		
			Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten		C	226.577.153	B	320.000.000	BB	340.000.000	BB	595.000.000	BB	800.000.000	A	880.000.000	A	1.106.577.153	
				Peningkatan Pemeringkatan LPPD		3037		3130		3180		3230		3300		3350		3350		
				Persentase tahapan penyampaian dokumen LKPJ Bupati		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			1 Penilaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan		1 Dokumenn	76.577.153											1 Dokumenn	76.577.153	Bag. Organisasi
			2 Monev Kinerja SKPD	Jumlah Laporan monev Kinerja Perangkat daerah				50 Laporan	60.000.000	50 Laporan	80.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	Bag. Organisasi
			3 Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Lkj tepat waktu				50 buku	170.000.000	45 PD	170.000.000	45 PD	175.000.000	45 PD	200.000.000	45 PD	240.000.000	45 PD	240.000.000	Bag. Organisasi
			4 Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Laporan Perjanjian Kinerja				50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	Bag. Organisasi
			5 Bimtek Aplikasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Peserta Bimtek		100%	150.000.000											100%	150.000.000	Bag. Organisasi
			6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD								1 dok	115.000.000	1 dok	180.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			7 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)	Jumlah Dokumen LKPJ								1 dok	115.000.000	1 dok	180.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda	Persentase penataan kelembagaan dan ketatausahaan Pemda		80%	676.540.624	80%	535.000.000	90%	380.000.000	90%	700.000.000	95%	990.000.000	100%	1.265.000.000	100%	2.061.540.624	
			1 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang OPD dan Peraturan Bupati Tentang Jabatan Struktural	Jumlah Ranperda dan ranperbup tentang jabatan struktural				20 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	110.000.000	30 dokumen	100.000.000	30 dokumen	100.000.000	30 dokumen	250.000.000	30 dokumen	250.000.000	Bag. Organisasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan		2 kali	70.000.000	2 kali	70.000.000	2 kali	70.000.000							2 kali	70.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			3 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015	Jumlah Dokumen		1 dokumen	113.540.624											1 dokumen	113.540.624	Bag. Organisasi
			4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Jumlah Dokumen										45 Dokumen	70.000.000	45 Dokumen	70.000.000	45 Dokumen	70.000.000	Bag. Organisasi
			5 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen										45 Dokumen	70.000.000	45 Dokumen	125.000.000	45 Dokumen	125.000.000	Bag. Organisasi
			6 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD	Jumlah Dokumen				45 Dokumen	95.000.000			45 Dokumen	100.000.000	45 Dokumen	100.000.000	45 Dokumen	150.000.000	45 Dokumen	150.000.000	Bag. Organisasi
			7 Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Perangkat daerah yang di evaluasi jabatan						45 OPD	120.000.000	45 OPD	130.000.000	45 OPD	150.000.000	45 OPD	150.000.000	45 OPD	150.000.000	Bag. Organisasi
			8 Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		12 kali	60.000.000	12 kali	80.000.000	12 kali	80.000.000							12 kali	80.000.000	Bag. Pembangunan dan Insfrastruktur
			9 Penyusunan Peraturan Daerah tentang SOTK sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2015 dan Perbup tentang Jabatan Struktural	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	340.000.000											1 Dokumen	340.000.000	Bag. Organisasi
			10 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi				50 buku	90.000.000					50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	50 buku	90.000.000	Bag. Organisasi
			11 Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi				12 kali	100.000.000									12 kali	100.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			12 Bimbingan Teknis dan Penyusunan Standar Pelayanan	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis		100%	93.000.000											100%	93.000.000	Bag. Organisasi
			13 Forum Koordinasi Kelembagaan	Jumlah peserta forum koordinasi								100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	Bag. Organisasi
			14 Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Laporan Forum Kelembagaan								45 Laporan	120.000.000	45 Laporan	130.000.000	45 Laporan	140.000.000	45 Laporan	140.000.000	Bag. Organisasi
			15 Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen standar kompetensi jabatan								45 Laporan	100.000.000	45 Laporan	130.000.000	45 Laporan	140.000.000	45 Laporan	140.000.000	Bag. Organisasi
	6. Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD			Nilai LPPD		3.037		3.130		3.180		3.230		3.300		3.350		3.350		
			Pemantapan Otonomi Daerah	Persentase tahapan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan		0%	622.000.000	0%	743.000.000	30%	1.202.000.000	35%	1.002.000.000	50%	1.045.000.000	75%	1.055.000.000	75%	1.357.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			9 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen LPPD		1 Dokumen	82.000.000	1 Dokumen	73.000.000	1 Dokumen	82.000.000							1 Dokumen	82.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			10 Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ						1 Dokumen	50.000.000							1 Dokumen	50.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		85%	3.743.223.440	85%	6.588.234.800	85%	7.196.390.200	90%	8.655.500.000	95%	9.230.000.000	100%	9.505.000.000	100%	9.708.000.000	
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tagihan pengiriman surat menyurat		12 bulan	143.600.000	12 bulan	165.000.000	12 bulan	175.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	Bag. Umum
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik dan air		12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	12 bulan	950.000.000	Bag. Umum
			3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		1 paket	307.000.000	1 paket	320.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	375.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	Bag. Umum
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya honorarium tenaga kebersihan yang dibayarkan		12 bulan	387.200.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	450.000.000	12 bulan	475.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	Bag. Umum
			5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		180 unit, 7 set, 8 paket	83.500.000	180 unit, 7 set, 8 paket	100.000.000	180 unit, 7 set, 8 paket	115.000.000	180 unit, 7 set, 8 paket	125.000.000	190 unit, 9 set, 10 paket	150.000.000	180 unit, 7 set, 8 paket	150.000.000	180 unit, 7 set, 8 paket	150.000.000	Bag. Umum
			6 Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan	Jumlah Peringatan Hari Jadi kab. Pesisir Selatan				1 kali	203.000.000									1 kali	203.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 bulan	40.700.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	Bag. Umum
			8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		12 bulan	55.800.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	Bag. Umum
			9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum		12 bulan	585.423.440	12 bulan	2.330.234.800	12 bulan	1.651.390.200	12 bulan	1.750.500.000	12 bulan	1.855.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	Bag. Umum
			10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti		12 bulan	500.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	650.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	Bag. Umum
			11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang diikuti		12 bulan	70.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	110.000.000	Bag. Umum
			12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan		12 bulan	350.000.000	12 bulan	375.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	Bag. Keuangan
			13 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah		6 dok	150.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	200.000.000	6 dok	225.000.000	6 dok	250.000.000	6 dok	250.000.000	6 dok	250.000.000	Bag. Keuangan
			14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi yang diikuti				6 bulan	500.000.000	12 bulan	1.700.000.000	12 bulan	1.800.000.000	12 bulan	1.900.000.000	12 bulan	1.900.000.000	12 bulan	1.900.000.000	Bag. Keuangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			15 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayarkan		12 orang		12 orang	180.000.000	12 orang	180.000.000	12 orang	190.000.000	12 orang	200.000.000	12 orang	210.000.000	12 orang	210.000.000	Bag. Keuangan
			16 Penyusunan dan Finalisasi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				7 Dok	110.000.000	7 Dok	210.000.000	7 Dok	250.000.000	7 Dok	270.000.000	7 Dok	280.000.000	7 Dok	280.000.000	Bag. Keuangan
			17 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		12 bulan	60.000.000					12 bulan	700.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	800.000.000	Bag. Keuangan
			18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan		12 bulan	60.000.000					10.000.000 Lembar, 120 buku, 500 kotak Amplop	350.000.000	10.000.000 Lembar, 120 buku, 500 kotak amplop	400.000.000	10.000.000 Lembar, 120 buku, 500 kotak amplop	450.000.000	10.000.000 Lembar, 120 buku, 500 kotak amplop	450.000.000	Bag. Keuangan
			Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	85%	3.115.900.000	85%	3.461.000.000	85%	6.083.000.000	90%	6.167.500.000	95%	6.520.000.000	100%	6.650.000.000	100%	6.792.000.000	
			1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		7 paket	70.000.000	7 paket	80.000.000	7 paket	80.000.000	7 paket	82.500.000	7 paket	90.000.000	7 paket	90.000.000	7 paket	90.000.000	Bag. Umum
			2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		50 paket	500.000.000	50 paket	650.000.000	50 paket	500.000.000	50 paket	550.000.000	50 paket	600.000.000	50 paket	600.000.000	50 paket	600.000.000	Bag. Umum
			3 Pengadaan Meubleur	Jumlah Pengadaan Meubiler		5 paket	256.000.000	5 paket	150.000.000	5 paket	170.000.000	5 paket	180.000.000	5 paket	200.000.000	5 paket	200.000.000	5 paket	200.000.000	Bag. Umum
			4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan						Peralatan dan mesin 5 paket, aset tetap lainnya 5 paket	300.000.000	Peralatan dan mesin 5 paket, aset tetap lainnya 5 paket	320.000.000	Peralatan dan mesin 5 paket, aset tetap lainnya 5 paket	330.000.000	Peralatan dan mesin 5 paket, aset tetap lainnya 5 paket	340.000.000	Peralatan dan mesin 5 paket, aset tetap lainnya 5 paket	340.000.000	Bag. Umum
			5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2				2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	60.000.000	3 unit	80.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	Bag. Umum
			6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas		15 unit	342.000.000	15 unit	650.000.000	15 unit	650.000.000	15 unit	650.000.000	15 unit	650.000.000	15 unit	650.000.000	15 unit	650.000.000	Bag. Umum
			7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		6 unit	991.000.000	6 unit	991.000.000	6 unit	991.000.000	6 unit	750.000.000	6 unit	800.000.000	6 unit	800.000.000	6 unit	800.000.000	Bag. Umum
			8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubleur	Jumlah Pemeliharaan Meubeliur		Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	35.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	40.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	42.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	45.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	50.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	50.000.000	Meja 20 unit, kursi 60 unit, lemari 10 unit, kursi sofa 3 unit	50.000.000	Bag. Umum
			9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	779.900.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	850.000.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	900.000.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	950.000.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	1.000.000.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	1.000.000.000	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	1.000.000.000	Bag. Umum
			10 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan						4 unit	600.000.000	4 unit	650.000.000	4 unit	670.000.000	4 unit	680.000.000	4 unit	680.000.000	Bag. Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						100%	200.000.000	Peralatan dan mesin 1 paket, aset tetap lainnya 1 paket	210.000.000	Peralatan dan mesin 1 paket, aset tetap lainnya 1 paket	220.000.000	Peralatan dan mesin 1 paket, aset tetap lainnya 1 paket	250.000.000	Peralatan dan mesin 1 paket, aset tetap lainnya 1 paket	250.000.000	Bag. Umum
			12 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						40 paket	900.000.000	40 paket	920.000.000	40 paket	930.000.000	40 paket	940.000.000	40 paket	940.000.000	Bag. Umum
			13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan						2 unit	700.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	900.000.000	2 unit	950.000.000	2 unit	950.000.000	Bag. Umum
			14 Pengadaan Kendaraan Roda 2	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2		5 unit	142.000.000											5 unit	142.000.000	Bag. Umum
			Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Arsip Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik		70%	515.000.000	75%	225.000.000	80%	230.000.000	85%	235.000.000	90%	250.000.000	90%	250.000.000	90%	570.000.000	
			1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip Lingkup Setda yang ditata		2000 berkas	195.000.000	2000 berkas	225.000.000	2500 berkas	230.000.000	2500 berkas	235.000.000	2500 berkas	250.000.000	2500 berkas	250.000.000	2500 berkas	250.000.000	Bag. Umum
			2 Peningkatan Nilai-nilai Historis Daerah	Jumlah Even yang dilaksanakan		1 kali	320.000.000											1 kali	320.000.000	Bag. Umum
			Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH	Persentase Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran Kepala Daerah		70%	3.840.000.000	75%	2.445.437.500	80%	1.800.000.000	85%	2.100.000.000	90%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	3.980.437.500	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH)	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan		12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	Bag. Umum
			2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (KDH)	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	1.005.000.000	12 bulan	645.437.500									12 bulan	645.437.500	Bag. Umum
			3 Penyediaan Makanan dan Minuman (KDH)	Jumlah baiaya makanan minuman		12 bulan	1.035.000.000											12 bulan	1.035.000.000	Bag. Umum
			4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (KDH)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah		12 bulan	1.700.000.000	12 bulan	1.700.000.000	12 bulan	1.700.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.200.000.000	12 bulan	2.200.000.000	12 bulan	2.200.000.000	Bag. Umum
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH)		80%	3.246.000.000	85%	4.189.000.000									85%	4.189.000.000	
			1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas (KDH)	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		12 bulan	902.000.000	12 bulan	1.198.000.000									12 bulan	1.198.000.000	Bag. Umum
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (KDH)	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara		2 unit	1.270.000.000	2 unit	1.840.000.000									2 unit	1.840.000.000	Bag. Umum



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (KDH)	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara		2 unit	600.000.000	2 unit	700.000.000									2 unit	700.000.000	Bag. Umum
			4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)	Jumlah Perlengkapan ruamah jabatan yang dipelihara		12 bulan	210.000.000	12 bulan	213.000.000									12 bulan	213.000.000	Bag. Umum
			5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang diPelihara		12 bulan	264.000.000	12 bulan	238.000.000									12 bulan	238.000.000	Bag. Umum
			Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		70%	<u>263.000.000</u>	75%	<u>291.000.000</u>	80%	<u>250.000.000</u>	85%	<u>275.000.000</u>	90%	<u>300.000.000</u>	100%	<u>300.000.000</u>	100%	<u>300.000.000</u>	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan		12 bulan	263.000.000	12 bulan	291.000.000	65 stel	250.000.000	65 stel	275.000.000	70 stel	300.000.000	70 stel	300.000.000	70 stel	300.000.000	Bag. Umum
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Setda yang dikelola dalam kondisi baik	-	80%	<u>340.000.000</u>	80%	<u>375.000.000</u>	85%	<u>540.000.000</u>	85%	<u>300.000.000</u>	90%	<u>300.000.000</u>	100%	<u>300.000.000</u>	100%	<u>560.000.000</u>	
			1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah lingkup Setda	-	4 dokumen	130.000.000	4 dokumen	175.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	300.000.000	Bag. Keuangan
			2 Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun		1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000							1 dokumen	60.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			3 Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun		1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	90.000.000							1 dokumen	90.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			4 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah		12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	90.000.000							12 dokumen	90.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			5 Pemilihan Rekrutmen PDAM Kabupaten Pesisir Selatan	Terpilihnya Direktur PDAM Kab. Pesisir Selatan		100%	20.000.000											100%	20.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur		85%	<u>280.000.000</u>	85%	<u>290.000.000</u>	90%	<u>290.000.000</u>	90%	<u>300.000.000</u>	95%	<u>400.000.000</u>	100%	<u>400.000.000</u>	100%	<u>400.000.000</u>	
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		25 orang	280.000.000	50	290.000.000	7 orang	290.000.000	8 orang	200.000.000	10 orang	250.000.000	10 orang	250.000.000	10 orang	250.000.000	Bag. Organisasi
			2 Peningkatan Kompetensi Camat	Persentase meningkatnya Kompetensi Camat		100%	111.000.000											100%	111.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
			3 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi								100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Bag. Organisasi
			Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemeringkatan kompetensi camat	-	6 Besar tingkat Provinsi	<u>326.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>355.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>355.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>245.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>255.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>265.000.000</u>	6 Besar tingkat Provinsi	<u>265.000.000</u>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Penilaian Kompetensi Camat	Jumlah Camat terbaik								3 Camat Terbaik	245.000.000	3 Camat Terbaik	255.000.000	3 Camat Terbaik	265.000.000	3 Camat Terbaik	265.000.000	Bag. Pemerintahan dan Otda
				Nilai Peringkat Tingkat Provinsi								3 besar		3 besar		3 besar		3 besar		
				Jumlah Peserta Workshop								30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		
			2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000							100%	105.000.000	Bag. Organisasi
			3 Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan Keprotokolan		12 bulan	221.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000							12 bulan	250.000.000	Bagian Humas dan Keprotokolan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		90%	200.000.000											90%	200.000.000	
			1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik	Jumlah Laporan		1 Laporan	200.000.000											1 Laporan	200.000.000	Bag. Keuangan
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu		75%	929.000.000	75%	835.000.000	75%	920.000.000	75%	1.307.500.000	75%	1.340.000.000	75%	1.345.000.000	75%	1.484.000.000	
			1 Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun								2 Dokumen	67.500.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			2 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah								12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	105.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	110.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			3 Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan		4 kali	100.000.000	4 kali	115.000.000	4 kali	120.000.000	4 kali	125.000.000	4 kali	135.000.000	4 kali	135.000.000	4 kali	135.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			4 Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan								12 kali	65.000.000	12 kali	70.000.000	12 kali	70.000.000	12 kali	70.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
			5 Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	-							1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	110.000.000	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur
				Jumlah dokumen standar harga barang yang disusun								1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
			6 Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati	Jumlah Rekomendasi Staf Ahli Bupati	-	10 rekomendasi	240.000.000	10 rekomendasi	270.000.000	10 rekomendasi	350.000.000	24 rekomendasi	400.000.000	24 rekomendasi	400.000.000	24 rekomendasi	400.000.000	24 rekomendasi	400.000.000	Staf Ahli
			7 Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	Asisten III
			8 Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	Asisten I



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			9 Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	Asisten III
			10 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi		1 kali	139.000.000											1 kali	139.000.000	Bag. Keuangan
			Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan keprotokoleran pemerintah daerah		50 kali	<u>375.000.000</u>	50 kali	<u>300.000.000</u>	50 kali	<u>350.000.000</u>	50 kali	<u>600.000.000</u>	55 kali	<u>610.000.000</u>	60 kali	<u>720.000.000</u>	60 kali	<u>720.000.000</u>	
			1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara yang difasilitasi		70 kali	375.000.000	70 kali	300.000.000	80 kali	350.000.000	80 kali	350.000.000	80 kali	350.000.000	80 kali	350.000.000	80 kali	350.000.000	Bag. Umum
			2 Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan								80 kali	250.000.000	80 kali	260.000.000	80 kali	370.000.000	80 kali	370.000.000	Bag. Humas dan Protokoler
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kepala Keluarga/ KK yang menerima penyaluran Raskin		24.298	290.000.000	24.298	307.000.000	24.298	286.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	357.000.000	
			1 Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin)	Jumlah Kepala Keluarga/ KK yang menerima penyaluran Raskin	-	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	24.298	150.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			2 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi		100%	86.000.000	100%	86.000.000	100%	86.000.000							100%	86.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			3 Monititoring, Evaluasi dan Pelaporan LPG 3 Kg	Jumlah Pangkalan LPG 3 Kg yang di Monev		100%	54.000.000	100%	71.000.000									100%	71.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi LPG 3 Kg/Gas dan BBM	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev						60	50.000.000							60	50.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Persentase Agen dan Pangkalan BBM dan Gas sesuai HET								85%	215.000.000	85%	250.000.000	85%	260.000.000	85%	260.000.000	
				Persentase peningkatan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan								80%		80%		85%		85%		
			1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev								60 pkln	90.000.000	60 pkln	100.000.000	60 pkln	110.000.000	60 pkln	110.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			2 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah PLTMH dan PLTS yang dimonev								48 kali	125.000.000	50 kali	150.000.000	50 kali	150.000.000	50 kali	150.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam	Persentase Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan yang terbina dan terawasi								70%	<u>200.000.000</u>	85%	<u>250.000.000</u>	90%	<u>250.000.000</u>	90%	<u>250.000.000</u>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Produksi Hasil Hutan	Produk hasil hutan yang dibina dan dimonev								1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi	Jumlah investor yang melaksanakan investasi di daerah								2 Investor	280.000.000	3 Investor	450.000.000	3 Investor	450.000.000	3 Investor	450.000.000	
			1 Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Jumlah Pameran Apkasi yang diikuti								1 kali	130.000.000	1 kali	275.000.000	1 kali	275.000.000	1 kali	275.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			2 Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekonomi pesisir selatan yang dilaksanakan	-							4 kali	150.000.000	4 kali	175.000.000	4 kali	175.000.000	4 kali	175.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi untuk pengendalian harga dan inflasi daerah								1 Rekomendasi	240.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	
			1 Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan	-							2 kali	100.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			2 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah Penerima KUR yang dimonitoring dan dievaluasi								15 Penerima KUR	140.000.000	30 Penerima KUR	150.000.000	30 Penerima KUR	150.000.000	30 Penerima KUR	150.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang	Persentase distributor dan Kios pupuk yang bersubsidi sesuai HET								15%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	
			1 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	-							115 Kios	150.000.000	115 Kios	150.000.000	115 Kios	150.000.000	115 Kios	150.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan		85%	385.000.000	90%	151.000.000	95%	205.000.000							95%	205.000.000	
			1 Pameran Aitis dan Festival Langkisau	Jumlah Pameran yang diikuti		2 kali	385.000.000											2 kali	385.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			2 Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Jumlah Pameran yang diikuti				1 kali	151.000.000	1 kali	130.000.000							1 kali	130.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			3 Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan						4 kali	75.000.000							4 kali	75.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar		85%	117.086.434	90%	117.086.434									90%	117.086.434	
			1 Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)	Jumlah Koordinasi Program Pembangunan		12 kali	117.086.434	12 kali	117.086.434									12 kali	117.086.434	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Wali Nagari	Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Wali Nagari		90%	895.924.745											90%	895.924.745	
			1 Fasilitas Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari	Persentase Terfasilitasinya pemekaran, pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari		100%	779.000.000											100%	779.000.000	Bag. Pemerintahan Nagari
			2 Inventarisasi Aset/Kekayaan Pemerintah Nagari	Jumlah Nagari yang diinventarisasi		192 nagari	116.924.745											192 nagari	116.924.745	Bag. Pemerintahan Nagari
			Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		90%	65.000.000											90%	65.000.000	
			1 Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan		100%	65.000.000											100%	65.000.000	Bag. Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan Pembinaan Keagamaan				Persentase Pembinaan Keagamaan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Kegiatan Keagamaan														100%		
	7. Meningkatnya Pembinaan Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)			Jumlah Cabang MTQ yang Menang		10 Cabang		10 Cabang		10 Cabang		10 Cabang		10 Cabang		10 Cabang		10 Cabang		
	8. Meningkatnya pembinaan Taman Pendidikan Alquran			Jumlah TPQ Aktif		80%		80%		90%		90%		95%		95%		95%		
			Peningkatan IMTAQ	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Jemaah Haji oleh Pemerintah Daerah		90%	200.000.000	90%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	2.575.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.755.000.000	100,0%	2.755.000.000	
				Peringkat MTQ Pesisir selatan		8 besar		8 besar		7 besar		5 besar		5 besar		5 besar		5 besar		
				Persentase kunjungan mesjid tim silaturahmi Pemda		50%		55%		60%		65%		70%		80%		80,0%		
				Persentase mesjid yang dapat hibah bansos		60%		60%		70%		70%		75%		80%		80,0%		
			1 Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkugan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan		24 kali	200.000.000	24 kali	225.000.000	24 kali	225.000.000	24 kali	250.000.000	24 kali	275.000.000	24 kali	275.000.000	24 kali	275.000.000	Bag. Kesra

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah	Jumlah safari Pemerintah daerah yang dilakukan								60 kali	350.000.000	60 kali	350.000.000	60 kali	350.000.000	60 kali	350.000.000	Bag. Kesra
			3 Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Jumlah cabang MTQ yang diikuti								10 cabang	1.200.000.000	10 cabang	1.200.000.000	10 cabang	1.200.000.000	10 cabang	1.200.000.000	Bag. Kesra
				Peringkat MTQ tingkat Propinsi								5 besar		5 besar		5 besar		5 besar		
			4 Fasilitasi Jemaah Haji	Jumlah Tenaga Pendamping Haji Daerah								1 orang	150.000.000	2 orang	150.000.000	2 orang	150.000.000	2 orang	150.000.000	Bag. Kesra
				Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi								115 orang		120 orang		120 orang		120 orang		
			5 Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi								15 kali	50.000.000	15 kali	60.000.000	15 kali	70.000.000	15 kali	70.000.000	Bag. Kesra
			6 Peningkatan Kapasitas KAN	Jumlah KAN yang dibina								37 KAN	90.000.000	37 KAN	110.000.000	37 KAN	110.000.000	37 KAN	110.000.000	Bag. Kesra
			7 Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan								12 kali	125.000.000	12 kali	150.000.000	12 kali	150.000.000	12 kali	150.000.000	Bag. Kesra
			8 Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial	Jumlah proposal Hibah bansos mesjid yang diverifikasi								150 Proposal	30.000.000	150 Proposal	35.000.000	150 Proposal	35.000.000	150 Proposal	35.000.000	Bag. Kesra
			9 Lomba Didikan Subuh Tergiat	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi								15 kali	50.000.000	15 kali	60.000.000	15 kali	70.000.000	15 kali	70.000.000	Bag. Kesra
			10 Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Al Quran	Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina								15 unit	200.000.000	15 unit	250.000.000	15 unit	250.000.000	15 unit	250.000.000	Bag. Kesra
			11 Sosialisasi Standarisasi MDQ, TPQ/TPSQ	Jumlah sosialisasi Standarisasi MDQ								3 Kali	80.000.000	5 Kali	90.000.000	6 Kali	95.000.000	6 Kali	95.000.000	Bag. Kesra
			Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		90%	1.446.000.000	90%	1.920.900.000	90%	1.635.900.000							90%	3.632.900.000	
			1 Safari Jum'at dan Safari Ramadhan	Jumlah Masjid yang dikunjungi		50 Mesjid	250.000.000											50 Mesjid	250.000.000	Bag. Kesra
			2 Persiapan dan Keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten	Persentase pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten		100%	700.000.000											100%	700.000.000	Bag. Kesra
			3 Fasilitasi Jemaah Haji	Jumlah Jamaah Haji yang difasilitasi		100 jamaah	130.000.000	105 jamaah	153.000.000	105 jamaah	170.000.000							105 jamaah	170.000.000	Bag. Kesra
			4 Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Proposal yang difasilitasi		100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%	50.000.000							100%	50.000.000	Bag. Kesra
			5 Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		12 kali	295.000.000	12 kali	190.000.000	12 kali	190.000.000							12 kali	190.000.000	Bag. Kesra
			6 Lomba Didikan Subuh Tergiat	Jumlah Masjid yang dikunjungi		100%	38.000.000											100%	38.000.000	Bag. Kesra
			7 Tim Silaturahmi Pemda	Jumlah Masjid yang dikunjungi				55 Masjid	400.900.000	60 Masjid	400.900.000							60 Masjid	400.900.000	Bag. Kesra
			8 Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Cabang yang diikuti						10 cabang	500.000.000							10 cabang	500.000.000	Bag. Kesra
			9 Persiapan dan Keikutsertaan MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang yang diikuti				10 Cabang	1.009.000.000									10 Cabang	1.009.000.000	Bag. Kesra
			10 Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Masjid yang dikunjungi				15 Kec	105.000.000	15 Kec	105.000.000							15 Kec	105.000.000	Bag. Kesra

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	10. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pada Forum Komunikasi, Pengetahuan Politik dan Partai Politik			Persentase Ormas Yang Terdaftar Aktif Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		80%		80%		90%		95%		95%		100%				
			Pendidikan dan Politik Masyarakat	Persentase Jumlah Ormas /LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap		80%	205.000.000	80%	330.000.000	80%	675.000.000	85%	925.000.000	90	965.000.000	95%	775.000.000	95%	1.095.000.000	
			1 Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah Sosialisasi UU dan Peraturan Bidang Politik yang dilaksanakan								15 kali	200.000.000	15 kali	200.000.000			15 kali	200.000.000	Bag. Kesbangpol
			2 Bimtek Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Bimtek Akuntabilitas bantuan keuangan Parpol		100%	95.000.000	11 Parpol	125.000.000	11 Parpol	150.000.000	15 Parpol	170.000.000	15 Parpol	190.000.000	15 Parpol	190.000.000	15 Parpol	190.000.000	Bag. Kesbangpol
			3 Meneliti dan Memeriksa Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi		100%	75.000.000	11 Parpol	100.000.000	11 Parpol	120.000.000							11 Parpol	120.000.000	Bag. Kesbangpol
			4 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah Pemantauan, Pelaporan, dan Perkembangan Politik di Daerah						12 kali	175.000.000	12 kali	175.000.000	12 kali	175.000.000	12 kali	175.000.000	12 kali	175.000.000	Bag. Kesbangpol
			5 Monitoring Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai dengan Undang-Undang Keormasan	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan		100%	35.000.000	29 ormas/LSM	35.000.000	29 ormas/LSM	150.000.000	40 ormas	150.000.000	45 ormas	150.000.000	50 ormas	160.000.000	50 ormas	160.000.000	Bag. Kesbangpol
			6 Penyuluhan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Ormas di Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peserta				100 orang	70.000.000	100 orang	80.000.000	100 orang	80.000.000	100 orang	80.000.000	100 orang	80.000.000	100 orang	80.000.000	Bag. Kesbangpol
			7 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi								15 Parpol	150.000.000	15 Parpol	170.000.000	15 Parpol	170.000.000	15 Parpol	170.000.000	Bag. Kesbangpol
			Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kasus yang ditangani atau di Fasilitasi	-	3 Kasus	260.000.000	3 Kasus	188.000.000	3 Kasus	208.000.000	4 Kasus	690.000.000	4 Kasus	710.000.000	5 Kasus	710.000.000	5 Kasus	885.000.000	
			1 Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab.Pessel	Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi	-	5 Aliran	85.000.000	5 Aliran	110.000.000	5 Aliran	130.000.000	5 Aliran	150.000.000	5 Aliran	170.000.000	5 Aliran	170.000.000	5 Aliran	170.000.000	Bag. Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	-			6 konflik sosial	78.000.000	20 Rekomendasi	78.000.000	21 rekomendasi	270.000.000	21 rekomendasi	270.000.000	21 rekomendasi	270.000.000	21 rekomendasi	270.000.000	Bag. Kesbangpol
			3 Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Jumlah penerbitan rekomendasi penelitian	-							50 Rekomendasi	100.000.000	50 Rekomendasi	100.000.000	50 Rekomendasi	100.000.000	50 Rekomendasi	100.000.000	Bag. Kesbangpol
			4 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi		4 konflik sosial	175.000.000											4 konflik sosial	175.000.000	Bag. Kesbangpol
			6 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah rekomendasi koordinasi Pimpinan Daerah								4 rekomendasi	170.000.000	4 rekomendasi	170.000.000	4 rekomendasi	170.000.000	4 rekomendasi	170.000.000	Bag. Kesbangpol
			Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Rekomendasi kebijakan pencegahan gangguan keamanan Nasional di Daerah		3 Rekomendasi	<u>500.000.000</u>	4 Rekomendasi	<u>920.000.000</u>	4 Rekomendasi	<u>590.000.000</u>	5 Rekomendasi	<u>635.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>640.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>650.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>1.240.000.000</u>	
				Persentase Penurunan Pungli di Kabupaten Pesisir Selatan		75%		80%		80%		85%		90%		95%		95%		
			1 Komunitas Intelligen Daerah	Jumlah Rekomendasi		15 Rekomendasi	200.000.000	20 Rekomendasi	200.000.000	20 Rekomendasi	200.000.000							20 Rekomendasi	200.000.000	Bag. Kesbangpol
			2 Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah rapat koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100%	300.000.000	100%	300.000.000	35 kali	300.000.000	35 kali	300.000.000	35 kali	300.000.000	35 kali	300.000.000	35 kali	300.000.000	Bag. Kesbangpol
			3 Tim Gabungan Pengendalian dan Penanganan Gangguan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Penanganan Gangguan				4 rekomendasi	30.000.000	4 rekomendasi	30.000.000	4 rekomendasi	35.000.000	4 rekomendasi	40.000.000	4 rekomendasi	50.000.000	4 rekomendasi	50.000.000	Bag. Kesbangpol
			4 Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar				16 kali sosialisasi	390.000.000									16 kali sosialisasi	390.000.000	Bag. Kesbangpol
			5 Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pungutan liar yang ditangani						3 kasus	60.000.000	3 kasus	300.000.000	4 kasus	300.000.000	4 kasus	300.000.000	4 kasus	300.000.000	Bag. Kesbangpol
			Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dimasyarakat		3 Rekomendasi	<u>121.000.000</u>	4 Rekomendasi	<u>171.000.000</u>	4 Rekomendasi	<u>271.000.000</u>	5 Rekomendasi	<u>600.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>630.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>630.000.000</u>	6 Rekomendasi	<u>630.000.000</u>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi tim kewaspadaan dini daerah			121.000.000		121.000.000		121.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000	4 kali	300.000.000	Bag. Kesbangpol
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini masyarakat		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		
			2 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Rapat Koordinasi kerukunan umat beragama yang dilaksanakan						4 kali	100.000.000	4 kali	150.000.000	4 kali	180.000.000	4 kali	180.000.000	4 kali	180.000.000	Bag. Kesbangpol
			3 Pemantauan kegiatan Orang Asing	Jumlah Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing yang dipantau	-			20 orang	50.000.000	24 orang	50.000.000	25 orang	150.000.000	26 orang	150.000.000	27 orang	150.000.000	27 orang	150.000.000	Bag. Kesbangpol
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Kehadiran Stakeholders dalam mengikuti Sidang Paripurna DPRD dalam Rangka memperingati		90%	400.000.000	90%	530.000.000	90%	770.000.000	90%	1.360.000.000	90%	1.520.000.000	90%	1.535.000.000	90%	1.535.000.000	
				Persentase Peserta yang memahami pengetahuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara		70%		75%		80%		85%		90%		90%		90%		
			1 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya		22 kali	200.000.000	22 kali	220.000.000	22 kali	240.000.000	22 kali	260.000.000	22 kali	280.000.000	22 kali	280.000.000	22 kali	280.000.000	Bag. Kesbangpol
			2 Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan		2 kali	200.000.000	250 peserta	260.000.000	2 kali	280.000.000	5 kali	300.000.000	5 kali	350.000.000	5 kali	350.000.000	5 kali	350.000.000	Bag. Kesbangpol
			3 Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan	Jumlah undangan yang hadir						1200 orang	200.000.000	1200 orang	250.000.000	1200 orang	260.000.000	1200 orang	270.000.000	1200 orang	270.000.000	Bag Pemerintahan dan Otda
				Jumlah sidang paripurna						1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
			4 Pelaporan RANHAM	Jumlah Laporan RanHam				10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	50.000.000	Bagian Hukum
			5 Cerdas Cermat Tentang Empat Konsesus Nasional (Empat Pilar) Tingkat SLTA se-Kab. Pesisir Selatan	Jumlah cerdas cermat empat pilar yang dilaksanakan								2 kali	80.000.000	2 kali	120.000.000	2 kali	125.000.000	2 kali	125.000.000	Bag. Kesbangpol
			6 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah rapat koordinasi pembauran kebangsaan yang dilaksanakan								4 kali	140.000.000	4 kali	160.000.000	4 kali	160.000.000	4 kali	160.000.000	Bag. Kesbangpol
			7 Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK)	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan								5 kali	130.000.000	5 kali	150.000.000	5 kali	150.000.000	5 kali	150.000.000	Bag. Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			8 Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk								5 gugus tugas	150.000.000	5 gugus tugas	150.000.000	5 gugus tugas	150.000.000	5 gugus tugas	150.000.000	Bag. Kesbangpol
			Manajemen Pelayanan Kependidikan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kependidikan		90%	42.000.000											90%	42.000.000	
			1 Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah Sekolah yang dibina		4 Tingkatan	42.000.000											4 Tingkatan	42.000.000	Bag. Kesra
			Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peringkat Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		8 besar	760.000.000	8 besar	50.000.000	5 besar	55.000.000	5 besar	65.000.000	3 besar	65.000.000	3 besar	65.000.000	3 besar	65.000.000	
			1 Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina		3 orang	45.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	55.000.000	15 orang	65.000.000	15 orang	65.000.000	15 orang	65.000.000	15 orang	65.000.000	Bag. Kesra
			2 Pelatihan Anggota Paskibra	Jumlah Anggota Paskibra yang dibina		100%	715.000.000											100%	715.000.000	Bag. Umum
			Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase PNS Yang Mengikuti Olah Raga		85%	40.000.000	90%	45.000.000	95%	45.000.000	95%	55.000.000	95%	55.000.000	95%	55.000.000	95%	55.000.000	Bag. Kesra
			1 Pemasyarakatan Olahraga Aparatur	Jumlah kegiatan olahraga aparatur yang dilaksanakan		24 kali	40.000.000	24 kali	45.000.000	24 kali	45.000.000	24 kali	55.000.000	24 kali	55.000.000	24 kali	55.000.000	24 kali	55.000.000	Bag. Kesra
JUMLAH							33.876.813.951		30.669.278.552		30.432.290.200		37.105.500.000		40.185.000.000		41.025.000.000		63.344.428.975,0	

-320.000.000

-226.577.153

(226.577.153)

